

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang*, Volume I Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- _____, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, *Politik Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Mahkota Kata, 2009).
- Binarko Santoso, *Petrologi Batu Bara Sumatera dan Kalimantan: Jenis, Peringkat, dan Aplikasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2015).
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI No. IX/MPR/2001* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2002).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Dyara Radhite Oryza Fea, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, (Yogyakarta: Legality, 2018).
- Frans Magnis Soeseno dalam Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2014).
- Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2017).

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Cetakan Kesatu*, (Bandung: Alfabet, 2017).
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Kartini Muljadi, (et.all)., *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Rinduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Supardi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- _____, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Tody Sasmitha, dkk., *Laporan Penelitian Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012, dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014).
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2012).
- _____, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- _____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

B. Jurnal:

- Afifah Kusumadara, “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No.2 Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Agus Budiarto, “Legal Research Methodology Reposition In Research on Social”, *Internatinal Journal of Criminology and Sociology*, Vol.9, (2020).
- Nurfakih Wirawan, “Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah”, *Seminar Nasional Pemikiran Mengenai Penyusunan Undang-Undang Tentang Hak Guna Ruang Bawah Tanah* (2012).
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang“, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Sapto Hermawan dan Supid Arso Hananto, “Pengaturan Ruang Bawah Tanah berdasarkan Prinsip Agraria Nasional”, ISSN 1907-8919 (Cetak), *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 16. Number 1. June 2021.
- Seventina Monda Devita, “Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2. No.9 (September 2021).
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 4-6, dalam Harris Y. P. Sibuea, “Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang Di Bawah Tanah”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2013.
- Sumral Buru Manoe, “Konstruksi Hak Menguasai Negara Dalam Tata Laksana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2* (Mei – Agustus 2014).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

D. Internet:

PEN: Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Internet: <https://www.bps.go.id/> diakses pada 08 Agustus 2021 Pukul 10.45 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perbedaan-ius-constitutum-dan-ius-constituendum-lt600553ac9e79e> diakses pada tanggal 10 Nopember 2022 Pukul 20.50 WIB.